DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Pengakat Daerah .....

3.3 Program dan Kegiatan .....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB V PENUTUP .....

XLI. KECAMATAN PURWOSARI

RENCANA KERJA KECAMATAN PURWOSARI

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Tahun 2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun– tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Purwosari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Purwosari. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Purwosari dengan Kebijakan Nasional, Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak

lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD dapat digambarkan pada bagan alur dibawah ini:

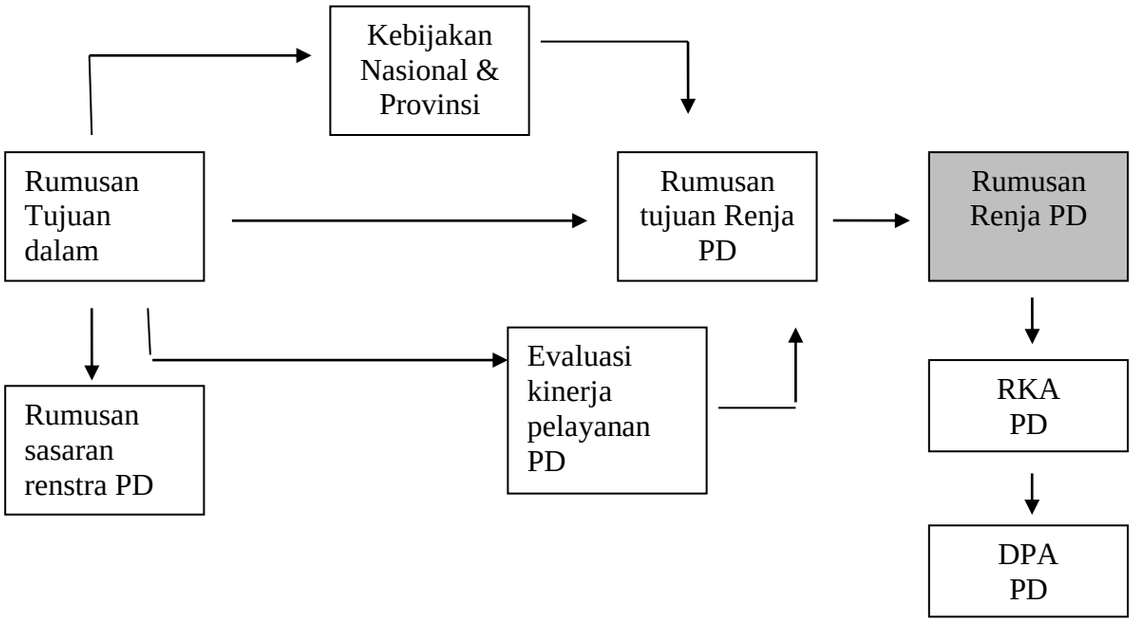

Gambar 1.1
Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja perangkat daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Purwosari merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program OrganisasiPerangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwosari sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Purwosari untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Tahun 2026;
3. Renja Kecamatan Purwosari merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Purwosari pada Tahun 2026 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode Perencanaan Strategis (Renstra) 2025-2029 Kecamatan Purwosari.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Purwosari merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Purwosari yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Purwosari mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Purwosari dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Purwosari, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwosari pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Purwosari yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Purwosari dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Purwosari, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Purwosari sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2045 serta RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Purwosari yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwosari;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Purwosari

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi

atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2026;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Renstra Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Tahun 2026 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2026, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Purwosari dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut:

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwosari.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Purwosari disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Purwosari Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
  - 3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
  - 3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026
  - 3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung 33 Program Prioritas
  - 3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Purwosari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)		
							Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)		Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi**	**10**	**%**	**10**	**%**	100		**59**	**%**	**59**	**100**		**259**	**%**	**65**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dapat dipertanggungjawabkan**					100		25	**%**	**25**	100		**225**	rek	**56**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20			Dokumen	**0**	5		**25**	orang	**6**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan**	23	Orang	23	Orang	14		14	Bulan	**100**	14	Bulan	**42**	orang	**11**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang	23	Orang	14		14	Bulan	**100**	30	Orang	**58**	jenis	**15**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	Dokumen	14	Dokumen	100		75	**%**	**75**	14	Dokumen	**189**	kali	**47**
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dokumen	3	Dokumen	100				**0**	12	Dokumen	**112**	jenis	**28**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan**					6,00 Stel				**#VALUE!**	100		**100**	jenis	**25**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					8,00 Peserta				**#VALUE!**	30	Paket	**30**	laporan	**8**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD**	6	**%**	6	**%**	100,00 persen		81	**%**	**#VALUE!**	100		**181**	orang	**45**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0		0		1		1	Paket	**100**	15	Paket	**17**	orang	**4**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	**Paket**	1	**Paket**	12		**9**	**Bulan**	**75**	**30**	Paket	**51**	%	**13**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	**Paket**	2	**Paket**	12		6	**Bulan**	**50**	30	Paket	**48**		**12**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	**Paket**	10	**Paket**	100		75	**%**	**75**	10	Paket	**185**		**46**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	100		75	**%**	**75**	3	Dokumen	**178**	jenis	**45**
	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Orang	1	Orang	12		9	**Bulan**	**75**	5	Orang	**26**	jenis	**7**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan BMD yang terealisasi**					100		25	**%**	**25**	100		**225**	gedung	**56**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan									**#DIV/0!**	1	Unit	**1**	bulan	**0**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan					100		25	**%**	**25**	5	Unit	**130**	kali	**33**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia**	18	**%**	18	**%**	1	**Kegiatan**	**1**	**Kegiatan**	**100**	**100**	**%**	**102**	**%**	**26**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	12		9	**Bulan**	**75**	**12**	**Laporan**	**33**	Pegawai	**8**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase BMD Kondisi baik**	24	**%**	24	**%**	4		**4**	**Kegiatan**	**100**	**100**		**108**	**%**	**27**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	3	Unit	12		12	**Bulan**	**100**	12	Unit	**36**	laporan	**9**
	Pemeliharaan Mebel										**#DIV/0!**			**0**	%	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara					12		12	**Bulan**	**100**	5	Unit	**29**	kali	**7**
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi									**#DIV/0!**	2	Unit	**2**	kali	**1**
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi									**#DIV/0!**	2	Unit	**2**	kali	**1**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu**					100		15	%	**15**	100		**215**	kali	**54**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait**					2		2	Kegiatan	**100**	100		**104**	kali	**26**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					100		100	%	**100**	12	Laporan	**212**	kali	**53**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2		2	Laporan	**100**	1	Dokumen	**5**	kali	**1**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif**	4	**%**	4	**%**	100		75	%	**75**	100		**275**	kali	**69**
	Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	**Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti**	4	**%**	4	**%**	100		49	%	**49**	100		**249**	kali	**62**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					2,00 laporan				**#VALUE!**	14	Lembaga	**14**	kali	**4**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	3	Laporan	100		49	%	**49**	1	Dokumen	**150**	kali	**38**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan**					12,00 bulan				**#VALUE!**	100		**100**	kali	**25**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari										**#DIV/0!**			**0**	%	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					12,00 bulan				**#VALUE!**	10	Unit	**10**	kali	**3**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12,00 bulan				**#VALUE!**	**4**	**Pokmas**	**4**	%	**1**
	Evaluasi Kelurahan	JumlahLaporan Hasil Evaluasi Kelurahan					12,00 bulan				**#VALUE!**	1	Laporan	**1**	kali	**0**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase penanganan gangguan trantibum**	8	**%**	8	**%**	100		**15**	%	**15**	**100**		**215**	**%**	**54**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum Presentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait**	24	**%**	24	**%**	100		15	%	**15**	100		**215**	kali	**54**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	**Laporan**	3	**Laporan**	12		**12**	**Bulan**	**100**	**12**	**Laporan**	**36**	%	**9**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12			**Bulan**	**0**	**12**	**Laporan**	**24**	kali	**6**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan**										100		**100**		**25**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**										**100**		**100**	**skor**	**25**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										50	Orang	**50**	nilai	**13**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik**										100	%	**100**	%	**25**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti**										100		**100**	%	**25**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa										12	Laporan	**12**	kali	**3**
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										14	Desa	**14**	kali	**4**

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Purwosari tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.
f. Perlu adanya peningkatan pemahaman pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaaan masyarakat kelurahan, sehingga masih kesulitan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Purwosari dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat dengan indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator tujuan Kecamatan Purwosari maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishment), dan kesejahteraan pegawai;
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Purwosari dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Purwosari;
   b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Purwosari sebagai perangkat daerah mempunyai tujuan dan sasaran dengan indikator yang dapat terukur. Indikator tujuan dan sasaran ditetapkan targetnya setiap tahun dan harus dicapai setiap tahunnya. Adapun Tujuan Kecamatan Purwosari Tahun 2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Adapun sasaran Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   Indikator : Persentase capaian penyelenggaraan kecamatan
   Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program =

$$\frac{\textit{Jumlah Capaian Indikator Kinerja Program}}{\textit{Jumlah Indikator Program}}$$

Capaian Indikator Kinerja Program =

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \; x \; \textit{100 \%}$$

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Nilai ini diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sakip oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Capaian kinerja Kecamatan Purwosari pada Tahun 2026 untuk indikator IKM telah mencapai target tahun 2026 dan telah melampaui target akhir Renstra karena adanya komitmen seluruh pegawai kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai SOP yang telah ditetapkan. Disamping itu, pelaksanaan evaluasi kinerja petugas pelaksana pelayanan publik secara berkala menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Indikator kinerja persentase penyelenggaraan kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya kerja sama dan kinerja yang baik antara seluruh pegawai kecamatan. Indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan karena aparatur Kecamatan Purwosari belum sepenuhnya memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi maupun individu sehingga memerlukan pembinaan yang intensif serta belum dimanfaatkannya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk menyesuaikan rencana aksi sehingga capaian kinerja lebih efektif. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	-	3,60	3,70	3,80	3,90	3,60		3,80	3,90
2	Persentase capaian hasil penyelenggaraan kecamatan	-	-	80	100%	100%	100%	80		100%	100%
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	75,01	76.02	77	78	75,01		77	78

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana PD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Purwosari, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Purwosari sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu di tingkatkan	Pelayanan Publik
2	Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan	
3	Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu di tingkatkan	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan cita-cita negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi negara melalui upaya yang terencana dan terpadu untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan demokratis sehingga mewajibkan membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra 2025-2029 dan mengacu kepada RKPD Tahun 2026. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja.

Adapun Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Tahun 2026 yang dilakukan oleh Kecamatan Purwosari sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Purwasari

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwasari

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Hasil Evaluasi Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kec. Purwasari**	**Persentase dokumen / laporan administrasi PD yang tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**4.299.993.226**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi**	**100**	**3.464.002.065**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase kesesuaian dokumen kinerja program / sub kegiatan / sub output dengan perencana, anggaran, dan laporannya**	**100%**	**10.285.000**	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dapat dipertanggungjawabkan**	**100**	**0**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	-		**Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Purwasari**			0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.285.000		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan**	**100**	**2.937.926.936**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	2.861.107.936	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan**	**100%**	**3.937.780.190**		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	14	38.838.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	224 org-bln	3.768.471.190		Pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD	12	37.980.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	204 org-bln	169.318.000		**Pengelolaan BMD Perangkat Daerah**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase dokumen yang akurat dan ketertiban**	**100**	**0**	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan keuangan, dan verifikasi keuangan SKPD	84 org-bln	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase laporan pengelolaan BMD yang akurat dan kebutuhan**	**100%**	-		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD**	**100**	**77.967.775**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	0	
	Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah		**Persentase kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan**	**100%**	-		Penyediaan Perlengkapan Rapat	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	23.153.375	
	Penggandaan, Penjilidan Dinas Beserta Atribut Perlengkapan		Jumlah Paket Penggandaan, Penjilidan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-		Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	30	2.803.000	
	Pendaftaran dan Penggolongan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Penggolongan dan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	3.099.400	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	7.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan SarPra PD**	**100%**	**111.667.684**		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	42.912.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	-		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase pengadaan BMD yang terealisasi**	**5**	**320.000.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 jenis	34.837.684		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Alat Angkutan Darat Bermotor	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Alat Angkutan Darat Bermotor yang Disediakan	1	320.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.100.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan	5	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36 jenis	-		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase jasa penunjang operasional kantor**	**100**	**33.372.854**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	11.499.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	33.372.854	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	10.285.000		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase BMD Kondisi baik**	**100**	**86.735.500**	
	Pasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100 org	-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Alat Angkutan Darat Bermotor	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Alat Angkutan Darat Bermotor yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	83.235.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	42.350.000		Pemeliharaan Meubelair	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Meubelair yang Dipelihara	0	0	
	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara	5	2.500.000	
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase pengadaan BMD yang terealisasi**	**100%**	**53.240.000**		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	0	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	0	
	Pengadaan Meubelair		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase Dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu**	**100**	**18.775.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	53.240.000		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan tepat waktu**	**100**	**18.775.000**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	2.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 unit	-		Fasilitasi dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	18.775.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia**	**100%**	**23.171.432**	3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif**	**100**	**789.510.985**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksakan	96 rek-bln	23.171.432		**Pemberdayaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang dibinadakan**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang dibinadakan**	**100**	**40.530.000**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 unit	-		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	20.880.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase BMD kondisi baik**	**100%**	**169.400.000**		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	19.650.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	137.940.000		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Purwasari**	**Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan**	**100**	**748.980.985**	
	Pemeliharaan Meubelair		Jumlah Mebel yang dipelihara	5 unit	-		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwasari	**Kelurahan Purwasari**			0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara	1 unit	16.940.000		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kelurahan Purwasari**	Jumlah Sarana dan Sarana lainnya yang Terbangun	10	204.870.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Paket	12.100.000		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Purwasari	**Kelurahan Purwasari**	Jumlah Lembaga dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	425.664.300	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi /dimanfaatkan	3 jenis	2.420.000		Evaluasi Keluarahan	**Kelurahan Purwasari**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	118.446.685	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu**	**100%**	**20.570.000**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase pemantauan gangguan trantibum**	**100**	**2.000.000**	
			2. Indeks Pelayanan Publik kecamatan			4	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Purwasari**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan yang dilaksanakan ke instansi terkait**	**100**	**3.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Instansi Vertikal		**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan tepat waktu**	**11 laporan**	**20.570.000**		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan	12	3.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	2 laporan	10.285.000		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12		
	Pemngendalian Ekstrimitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Pengendalian Ekstrimitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 laporan	10.285.000		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Purwasari**	**Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai ketentuan**	**100**	**23.115.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilimpahkan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan		**Persentase laporan kegiatan PATEN yang diselesaikan tepat waktu**	**11 laporan**	-	5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Pengkoordinasian Kepala Daerah	**Kecamatan Purwasari**	**Jumlah Peserta yang mengikuti pemilihan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**100**	**23.115.000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	3 Jneis	-		Pemilihan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	23.115.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Pemerintah Kab/Kota Camat		**Persentase pelaksanaan SPM PP PP2**	**100%**	-	6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Purwasari**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi Desa yang Baik**	**100**	**6.265.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Lainnya		Jumlah Laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lpaoran	-		**Fasilitasi Kelembagaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Purwasari**	**Fasilitasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**100**	**6.265.000**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**1. Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif**	**38%**	**1.100.491.451**		Administrasi dalam Pemerintahan Desa	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Dokumen yang tertata dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	6.265.000	
			2. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif				Pasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kecamatan Purwasari**	Jumlah Dokumen Pasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**1 laporan**	**10.285.000**							
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	-							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	10.285.000							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**1. Persentase kelembagaan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan**	**1 laporan**	**1.090.166.451**							
			2. Persentase masyarakat kelurahan yang berpartisipasi									
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	423.500.000							
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwasari		Jumlah Lembaga dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	548.313.920							
	Evaluasi Kelurahan		Jumlah laporan hasil evaluasi di kelurahan	12 Bulan	118.352.531							
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase penanganan gangguan trantibum**	**83%**	**30.250.000**							
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Ketentiban Umum		**Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait**	**70%**	**30.250.000**							
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan	4 laporan	15.125.000							
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	15.125.000							
	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		**Terwujudnya ketertiban masyarakat**	**100%**	-							
	Koord/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	2 Laporan	-							
	PROGRAM PENGGARAAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan**	**100%**	**25.045.000**							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kewenangan Kepala Daerah		**Persentase laporan yang ditindaklanjuti pemilihan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional**	**3 Laporan**	**25.045.000**							
	Pemilihan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	25.045.000							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi Desa yang Baik**	**100%**	**15.015.000**							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti**	**12 laporan**	**15.015.000**							
	Pasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	ada	15.015.000							
	Pasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	12 laporan	-							
	Pasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14 Desa	-							
	Total Belanja				**5.491.284.677**						**4.304.998.060**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Purwosari Tahun 2026 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses buttom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan.* Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Purwosari saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan Kecamatan Purwosari mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilisasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Purwosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwosari

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapain tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai sengan misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public.*

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Purwosari telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni:

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum

	dengan lainnya.		
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi/ LSM/masyarakat umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikanya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tujuan dan sasarannya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut. Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan strategisnya, maka tujuan strategis yang di tetapkan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Tujuan strategis yang dicapai Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dengan indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Sasaran strategis Kecamatan Purwosari merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan serta merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang di tetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di tetapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan strategis juga dapat di capai.

Adapun korelasi antara tujuan, Sasaran dan strategi Kecamatan Purwosari terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Capaian Tahun ke-	Proyeksi	Target
				2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan ditingkat Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3,60	3,70	3,80
1.1		Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembedayaan masyarakat desa	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	80	100%	100%
1.2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,01	76.02	77

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Kecamatan Purwosari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan sebagai berikut:

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Meubelair
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Meubelair
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari
	Evaluasi Kelurahan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Program dan kegiatan di atas merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap PD wajib melakukan pemetaan progam dan kegiatan menurut kodefikasi, Nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dilampiri dengan tabel pemetaan serta Lampiran KUAPPAS

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Purwosari sebagai penyelenggara pelayanan publik mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2026 yang dapat mendukung prioritas pembanguanan tersebut terdapat pada table berikut:

Tabel 3.4

Matrik 33 Program Prioritas Bupati pada Renja PD Kecamatan Purwosari 2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					NIHIL								

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis

Proyek strategis merupakan langkah akselerasi dalam mewujudkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Kecamatan Purwosari sebagai bagian dari pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi kecamatan mendukung beberapa proyek strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Purwosari yang mendukung proyek strategis terdapat pada tabel berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
	NIHIL			

3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Kecamatan Purwosari sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik memiliki beberapa inovasi untuk mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kecamatan. Implementasi inovasi pelayanan publik tersebut didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Tahun 2026

No.	Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
		NIHIL			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagaimana pada tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Purwosari Tahun 2026 berikut:

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Pasuruan

Kecamatan Purwosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**Persentase kebutuhan**	**PROGRAM PENUNJANG**	**Purwosari**	**100**	**3.464.002.065**	**APBD**		**100**	**5.177.204.482**
	Terlaksananya Administrasi tata kelola PD		Terlaksananya Administrasi	Purwosari			APBD			
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	**Persentase laporan**	**Perencanaan,**	**Purwosari**	**100**	**0**	**APBD**		**100**	**3.396.800**
	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan		Terlaksananya	Purwosari			APBD			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat					0				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan									
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan**	**Administrasi Keuangan**	**Purwosari**	**100**	**2.937.925.936**	**APBD**		**100**	**3.736.449.391**
	Tersedianya Laporan Keuangan yang akurat		Tersedianya Laporan	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN	Jumlah Orang yang	Penyediaan Gaji dan	Purwosari	30	2.861.107.936	APBD		30	3.503.482.459
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil	Penyediaan Administrasi	Purwosari	14	38.838.000	APBD		14	187.228.932
	Tersedianya Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Pelaksanaan	Purwosari			APBD			
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Jumlah Dokumen	Pelaksanaan penatausahaan	Purwosari	12	37.980.000	APBD		12	45.738.000
	Terlaksanaya penatausahaan dan		Terlaksanaya	Purwosari			APBD			
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen**	**Administrasi Kepegawaian**	**Purwosari**	**100**	**0**	**APBD**		**100**	**0**
	Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat		Terlaksanaya Administrasi	Purwosari			APBD			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian	Pengadaan Pakaian Dinas	Purwosari	30	0	APBD		30	0
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut		Tersedianya Pakaian Dinas	Purwosari			APBD			
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan**	**Administrasi Umum**	**Purwosari**	**100**	**77.967.775**	**APBD**		**100**	**168.202.320**
	Tersedianya kebutuhan umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan umum	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Paket Komponen	Penyediaan Komponen	Purwosari	12	0	APBD		12	2.504.700
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/		Tersedianya Komponen	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan	Penyediaan Peralatan dan	Purwosari	30	21.153.375	APBD		30	27.548.400
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan	Penyediaan Peralatan Rumah	Purwosari	30	2.803.000	APBD		30	4.475.350
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang	Penyediaan Barang Cetakan	Purwosari	10	4.099.400	APBD		10	5.259.870
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Jumlah Dokumen Bahan	Penyediaan Bahan Bacaan	Purwosari	3	7.000.000	APBD		3	6.600.000
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan		Tersedianya Bahan Bacaan	Purwosari			APBD			
	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi	Jumlah Laporan	Penyelenggaraan Rapat	Purwosari	5	42.912.000	APBD		5	121.814.000
	Tersedianya Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Rapat Koord.	Purwosari			APBD			
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase pengadaan**	**Pengadaan Barang Milik**	**Purwosari**	**5**	**330.000.000**	**APBD**		**5**	**72.149.000**
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Tersedianya Barang Milik	Purwosari			APBD			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan	Pengadaan Kendaraan	Purwosari	1	330.000.000	APBD		1	0
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau		Tersedianya Kendaraan	Purwosari			APBD			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan	Pengadaan Peralatan dan	Purwosari	5	0	APBD		5	72.149.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan	Purwosari			APBD			
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	**Persentase jasa**	**Penyediaan Jasa**	**Purwosari**	**100**	**31.372.854**	**APBD**		**100**	**40.112.875**
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Tersedianya Jasa Penunjang	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan	Penyediaan Jasa	Purwosari	12	31.372.854	APBD		12	40.112.875
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Listrik, Air		Tersedianya Jasa	Purwosari			APBD			
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Prosentase BMD Kondisi**	**Pemeliharaan Barang Milik**	**Purwosari**	**100**	**86.735.500**	**APBD**		**100**	**135.778.500**
	Tersedianya Pembayran Pajak, Pemeliharaan		Tersedianya Pembayran	Purwosari			APBD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	Penyediaan Jasa	Purwosari	12	84.235.500	APBD		12	120.796.500
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya		Tersedianya Jasa	Purwosari			APBD			
	Pemeliharaan Mebel					0				
	Tersedianya Pemeliharaan Mebel									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	Pemeliharaan Peralatan dan	Purwosari	5	2.500.000	APBD		5	3.960.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan	Purwosari			APBD			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Purwosari	2	0	APBD		2	11.022.000
	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan		Tersedianya Pemeliharaan/	Purwosari			APBD			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Purwosari	2	0	APBD		2	0
	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan		Tersedianya Pemeliharaan/	Purwosari			APBD			
	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN	**Persentase dokumen**	**PROGRAM**	**Purwosari**	**100**	**18.775.000**	**APBD**		**100**	**13.598.200**
	Meningkatnya pelayanan terpadu satu pintu		Meningkatnya pelayanan	Purwosari			APBD			
	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	**Persentase kegiatan**	**Koordinasi**	**Purwosari**	**100**	**18.775.000**	**APBD**		**100**	**13.598.200**
	Tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan		Tersedianya	Purwosari			APBD			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan	Koordinasi/Sinergi	Purwosari	12	2.000.000	APBD		12	0
	Tersedianya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan		Tersedianya	Purwosari			APBD			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen	Peningkatan Efektifitas	Purwosari	1	18.775.000	APBD		1	13.598.200
	Tersedianya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di		Tersedianya Efektifitas	Purwosari			APBD			
	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	**Persentase Lembaga**	**PROGRAM**	**Purwosari**	**100**	**789.510.985**	**APBD**		**100**	**870.887.267**
	Tersedianya Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan		Tersedianya Partisipasi	Purwosari			APBD			
	1 Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	**Persentase hasil evaluasi**	**Koordinasi Kegiatan**	**Purwosari**	**100**	**40.530.000**	**APBD**		**100**	**46.959.000**
	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Desa		Tersedianya Kegiatan	Purwosari			APBD			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga	Peningkatan Partisipasi	Purwosari	14	20.880.000	APBD		14	23.399.200
	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum		Terlaksananya Partisipasi	Purwosari			APBD			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan	Peningkatan Efektifitas	Purwosari	12	19.650.000	APBD		12	23.559.800
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan		Terlaksananya Efektifitas	Purwosari			APBD			
	2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase masyarakat**	**Kegiatan Pemberdayaan**	**Purwosari**	**100**	**748.980.985**	**APBD**		**100**	**823.928.267**
	Terlaksananya Pembangunan /Rehabilitasi Sarana		Terlaksananya Pembangunan	Purwosari			APBD			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					0				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan	Pembangunan Sarana dan	Purwosari	10	204.870.000	APBD		10	242.424.487
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana		Terlaksananya Pembangunan	Purwosari			APBD			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan	Pemberdayaan Masyarakat di	Purwosari	4	425.664.300	APBD		4	468.235.680
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di		Terlaksananya	Purwosari			APBD			
	Evaluasi Kelurahan	JumlahLaporan Hasil	Evaluasi Kelurahan	Purwosari	1	118.446.685	APBD		1	113.268.100
	Tersedianya Evaluasi di Kelurahan Purwosari		Tersedianya Evaluasi di	Purwosari			APBD			
	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	**Persentase penanganan**	**PROGRAM KOORDINASI**	**Purwosari**	**100**	**3.000.000**	**APBD**		**100**	**64.035.400**
	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat		Meningkatnya Kerukunan	Purwosari		**3.000.000**	APBD			
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	**Jumlah Laporan Hasil**	**Koordinasi Upaya**	**Purwosari**	**100**		**APBD**		**100**	**64.035.400**
	Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		Tersedianya Koordinasi	Purwosari		3.000.000	APBD			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil	Sinergitas dengan Kepolisian	Purwosari	12		APBD		12	17.393.200
	Tersedianya Sinergitas dengan Kepolisian Negara		Tersedianya Sinergitas	Purwosari		0	APBD			
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan	Harmonisasi Hubungan	Purwosari	12		APBD		12	46.642.200
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan		Terlaksananya Harmonisasi	Purwosari		**0**	APBD			
	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	**Prosentase konflik SARA**	**PROGRAM**	**Purwosari**	**100**	**23.115.000**	**APBD**		**100**	**77.000.000**
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kepolisian dan		Terlaksananya Koordinasi	Purwosari			APBD			
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah Peserta yang**	**Penyelenggaraan Urusan**	**Purwosari**	**100**	**23.115.000**	**APBD**		**100**	**77.000.000**
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan		Terlaksananya	Purwosari			APBD			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah Orang yang	Pembinaan Wawasan	Purwosari	50	23.115.000	APBD		50	77.000.000
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan		Terlaksananya Pembinaan	Purwosari			APBD			
	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Persentase**	**PROGRAM PEMBINAAN**	**Purwosari**	**100**	**6.295.000**	**APBD**		**100**	**17.762.800**
	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Desa		Meningkatnya tata kelola	Purwosari			APBD			
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	**Persentase hasil**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan**	**Purwosari**	**100**	**6.295.000**	**APBD**		**100**	**17.762.800**
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan		Terlaksananya Fasilitasi,	Purwosari			APBD			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang	Fasilitasi Administrasi Tata	Purwosari	14	6.295.000	APBD		14	17.762.800
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata		Terlaksananya Fasilitasi	Purwosari			APBD			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi	Fasilitasi Pelaksanaan	Purwosari	8		APBD		8	0
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan		Terlaksananya Fasilitasi	Purwosari			APBD			
						4.304.698.050				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan

	PUBLIK		Instansi Vertikal Terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi

			Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Purwosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwosari. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Purwosari ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari

rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan program – program yang dijalankan bisa tepat sasaran, optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Purwosari.

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Camat Purwosari		
Sekretaris Kecamatan Purwosari		
Kabid Bappelitbangda		

rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun 2026 sebagai berikut:

3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan program – program yang dijalankan bisa tepat sasaran, optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Purwosari.

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO